

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka gotong royong nasional, sebagai peran serta masyarakat dalam pengembangan nasional dan pembiayaan negara. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu adanya yang memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu berupa pajak.

Salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan Negara adalah Pajak. Pajak merupakan andalan utama kemudian dalam pembiayaan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga semakin disadari sebagai suatu hal yang perlu untuk didukung keberhasilannya. Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut berasal dari pendapatan negara dan hibah, khususnya berasal dari pendapatan dalam negeri. Sumber penerimaan dalam negeri yang terbesar berasal dari penerimaan perpajakan hal tersebut terlihat dalam tingkat yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan Negara dan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan.

Di Indonesia pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah berupaya dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah, dana pinjaman daerah, dan dana peimbangan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatannya agar dapat menjalankan tugas-tugas

pemerintah dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang ada, sehingga mendorong daerah untuk berkembang dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, maka sesuai amanat dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah ditetapkan kewenangan kepada daerah Provinsi untuk memungut 5 (lima) jenis pajak, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (AP), dan Pajak Rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut oleh pemerintah daerah provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang sangat berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sangat berpotensi mengingatkan pengguna dari kendaraan bermotor sendiri jumlahnya terus meningkat. Oleh sebab itu, pajak kendaraan bermotor sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Dalam penginputan laporan Pajak Kendaraan Bermotor bagian Akuntansi dan Pelaporan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi wajib membuat pembukuan atas diterimanya pajak tersebut dan sudah dipermudah dengan menggunakan sistem informasi daerah atau SIMDA. Penggunaan sistem informasi

ataupun teknologi informasi dalam suatu pemerintahan ditunjukan agar suatu institusi pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Secara umum peran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah perumusan kebijakan, koordinasi teknis dalam hal pendapatan melakukan penetapan-penetapan pendapatan yang diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir yaitu **“Tata Cara Penerimaan dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi”**

1.2 Masalah Pokok Penulisan

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana tata cara penerimaan dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi?
2. Apa saja kendala yang terdapat pada penerimaan dan perhitungan pajak daerah atas pajak kendaraan bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor daerah provinsi jambi di Badan Keuangan Daerah

Provinsi Jambi (BAKEUDA) serta kendala yang terdapat pada penerimaan pajak daerah atas Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penulisan Laporan Tugas Akhir di kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis, serta menyadarkan masyarakat agar selalu taat dalam membayar pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Agar memberikan hasil dari prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Kendaran Bermotor dikantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

1.4 Metode Penulisan Laporan

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data sekunder, yang berarti:

1. Data Primer

Yaitu merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.

2. Data Sekunder

Yaitu merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis atau yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah:

1. Observasi

Mengadakan pengamatan secara langsung data-data yang ada kaitannya dengan masalah prosedur pemungutan dan perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan cara mengamati dokumen-dokumen yang ada.

2. Wawancara

Metode yang digunakan adalah dengan cara wawancara langsung kepada pegawai di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

3. Studi Pustaka

Memperoleh data yang berkenaan dengan teori-teori yang digunakan berkaitan dengan laporan magang. Mempelajari konsep-konsep dan materi-materi yang terdapat pada buku dan dokumen dari Badan Keuangan Provinsi Jambi.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

1.5.1 Waktu

Melaksanakan kegiatan magang ini pada saat memasuki semester ke-6. Kegiatan magang dilaksanakan sekitar 2 bulan dimulai pada Tanggal 08 Februari 2021 s.d 08 April 2021.

1.5.2 Lokasi Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No.117.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan ini maka akan dipaparkan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan metode penulisan yang meliputi metode pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bagian ini menjelaskan tentang konsep yang digunakan untuk pembahasan dan data-data yang berhubungan erat dengan judul dan pokok bahasan laporan.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bagian ini berisi tentang evaluasi yang terdapat dalam bagian BAB III, yang memuat gambaran umum lokasi magang serta menjelaskan dan membahas masalah pokok yang diangkat menjadi topik pembahasan.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengamatan serta saran yang dijadikan masukan bagi Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi yang berguna untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya

